

LAPORAN BERKALA

PENGELOLAAN RISIKO

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TRIBULAN I TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko merupakan kata yang kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut.

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni yaitu risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, dan risiko spekulatif yaitu risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis yang muncul dari perubahan kondisi tertentu (perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, yang dapat memunculkan jenis-jenis risiko baru) dan risiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu (secara praktis risiko tidak berubah dari waktu ke waktu). Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Ada beberapa definisi dari manajemen risiko organisasi/perusahaan pada umumnya, diantaranya:

1. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg, *The Practice of Risk Management*, Euromoney Book, 2004)

2. *Enterprise Risk Management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Lam, James, *Enterprise Risk Management*, Wiley, 2004)

3. *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup

pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. (COSO, COSO Enterprise Risk anagement - Integrated Framework. COSO, 2004).

Sedangkan menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengembangan budaya sadar Risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko, dan penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Pengembangan Budaya sadar Risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/ atau pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk terdiri atas Unit Pemilik Risiko yang (UPR) merupakan unit pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit, Unit kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari perumusan sistem Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko, dan monitoring dan evaluasi sistem Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan diterapkan secara periodik selama 1 (satu) tahun dan terdiri atas tahapan yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, pemantauan dan *review*.

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, besaran/Level Risiko Residual, Harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga Besaran dan atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Pemantauan dan *Review* bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan *review* Risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari manajemen risiko pada intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian

visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Di lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen risiko juga telah didukung dengan perangkat aturan yang sesuai dengan standar manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan selalu memperhatikan situasi terkini dan ketidakpastian di masa mendatang, selain juga dari sasaran organisasi yang telah ada, sehingga identifikasi risiko dalam organisasi dapat lebih beragam dan lebih banyak kategori risiko. Hal ini dapat turut berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sejak dini dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko tersebut sebelum membesar.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

REGISTER RISIKO STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak Risiko	Pihak Terkena
1	Meningkatnya Kapasitas Usaha Budidaya Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Tidak tercapainya target peningkatan populasi ternak	RSO.25.27.31.01	Kepala Dinas	Pengendalian penyakit dan cakupan vaksinasi ternak belum optimal	Internal & Eksternal	UC	Penurunan ketersediaan pangan hewani daerah serta berkurangnya aset dan pendapatan peternak	Peternak, Konsumen, Pemerintah Daerah
						Keterbatasan akses bibit unggul dan teknologi reproduksi				
						Ketersediaan dan kualitas pakan belum stabil sepanjang tahun				
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Peternakan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan	Tidak tercapainya peningkatan nilai tambah produk peternakan	RSO.25.27.31.02	Kepala Dinas	Produk peternakan masih didominasi penjualan bahan mentah	Internal	UC	Nilai jual produk peternakan tidak meningkat dan pendapatan peternak stagnan	Peternak, Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah
						Penguasaan teknologi pengolahan hasil peternakan masih terbatas				
						Kepemilikan sertifikasi mutu dan keamanan pangan masih rendah				

REGISTER RISIKO OPERASIONAL
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026

No	Sub Kegiatan	Indikator	Tahap	Jenis Risiko	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sumber Risiko	C / UC	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Pihak Terdampak
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pelaksanaan	Operasional	Ketidaktepatan pemanfaatan sarana oleh peternak	ROO.25.27.31.01	Kabid	Internal	C	Lemahnya pemetaan kebutuhan riil dan panduan teknis tidak spesifik	Bantuan sarana tidak tepat guna dan produktivitas peternak stagnan	Peternak, Dinas
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pelaksanaan	Operasional	Kegagalan standarisasi mutu genetik ternak	ROO.25.27.31.02	Kabid	Internal/Eksternal	C/UC	Seleksi bibit tidak sesuai kriteria teknis dan faktor lingkungan tidak mendukung	Penurunan kualitas genetik populasi ternak	Peternak, Dinas
3	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Pelaksanaan	Operasional	Hasil pengujian obat hewan tidak valid atau tidak akurat	ROO.25.27.31.03	Kabid	Internal	C	Alat uji tidak terkalibrasi dan kepatuhan SOP rendah	Kesalahan keputusan pengawasan dan risiko keracunan ternak	Peternak, Masyarakat
4	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelaksanaan	Operasional	Tidak terpenuhinya standar mutu produksi benih, bibit ternak dan pakan	ROO.25.27.31.04	Kabid	Internal	C	Pengawasan mutu tidak konsisten dan kepatuhan produsen rendah	Produk bermutu rendah beredar di masyarakat	Peternak, Masyarakat

5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pelaksanaan	Operasional	Ternak bantuan hilang, dijual atau tidak dipelihara penerima	ROO.25.27.31.05	Kabid	Internal/Eksternal	C	Verifikasi penerima bantuan lemah dan monitoring pasca bantuan terbatas	Program peningkatan populasi ternak tidak tercapai	Peternak, Dinas
6	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pelaksanaan	Operasional	Keterlambatan atau mutu hijauan pakan tidak sesuai standar	ROO.25.27.31.06	Kabid	Internal/Eksternal	C/UC	Koordinasi pemasok lemah dan kontrol mutu distribusi kurang	Kebutuhan pakan ternak tidak terpenuhi optimal	Peternak, Dinas
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pelaksanaan	Operasional	Kerusakan dini atau kegagalan struktur jalan usaha tani	ROO.25.27.31.07	Kabid	Internal	C	Perencanaan teknis dan pengawasan konstruksi kurang	Akses distribusi hasil pertanian dan peternakan terganggu	Peternak, Masyarakat
8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pelaksanaan	Operasional	Prasarana tidak berfungsi optimal atau tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.27.31.08	Kabid	Internal	C	Perencanaan tidak berbasis kebutuhan lapangan	Prasarana tidak dimanfaatkan optimal	Peternak, Dinas
9	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pelaksanaan	Operasional	Fasilitas layanan kesehatan hewan tidak berfungsi optimal	ROO.25.27.31.09	Kabid	Internal	C	Desain fasilitas dan SDM teknis terbatas	Penanganan penyakit hewan tidak maksimal	Pemilik Hewan
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pelaksanaan	Operasional	Operasional RPH tidak memenuhi standar higiene sanitasi	ROO.25.27.31.10	Kabid	Internal	C	Penerapan SOP RPH belum optimal	Risiko kontaminasi daging meningkat	Konsumen

11	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pelaksanaan	Operasional	Kegagalan mitigasi penyebaran penyakit zoonosis	ROO.25.27.31.11	Kabid	Internal	C	Data epidemiologi tidak akurat dan koordinasi lintas sektor lemah	Wabah penyakit dan kerugian ekonomi	Peternak, Masyarakat
12	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Pelaksanaan	Operasional	Lolosnya hewan atau produk hewan ilegal melalui perbatasan	ROO.25.27.31.12	Kabid	Internal	C	Personel terbatas dan jalur tidak resmi tidak terpantau	Penyakit hewan masuk dan menyebar	Peternak, Konsumen, Dinas
13	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Pelaksanaan	Operasional	Layanan laboratorium tidak memenuhi standar mutu	ROO.25.27.31.13	Kabid	Internal	C	Peralatan dan SDM laboratorium terbatas	Keandalan hasil layanan menurun	Peternak
14	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelaksanaan	Operasional	Komplikasi atau kematian ternak pasca tindakan medis	ROO.25.27.31.14	Kabid	Internal	C	Diagnosis tidak tepat dan keterbatasan peralatan medis	Kerugian ekonomi peternak	Peternak
15	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelaksanaan	Operasional	Hasil pengujian tidak akurat sehingga produk hewan tidak aman beredar	ROO.25.27.31.15	Kabid	Internal	C	Metode pengujian dan kompetensi laboratorium terbatas	Ancaman keracunan pangan	Konsumen

16	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina Untuk Penerapan Persyaratan Hygiene Sanitasi	Pelaksanaan	Operasional	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap standar hygiene	ROO.25.27.31.16	Kabid	Internal/Eksternal	C	Monitoring tidak rutin dan sosialisasi pedoman kurang	Risiko cemaran pangan tetap tinggi	Konsumen
17	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Masyarakat tidak menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	ROO.25.27.31.17	Kabid	Internal/Eksternal	C	Metode sosialisasi tidak efektif	Praktik penanganan hewan tidak sesuai standar	Masyarakat
18	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pembinaan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Penolakan prinsip kesejahteraan hewan oleh pelaku usaha	ROO.25.27.31.18	Kabid	Internal/Eksternal	C/UC	Biaya implementasi dianggap tinggi oleh pelaku usaha	Standar kesejahteraan hewan tidak tercapai	Unit Usaha
19	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Pelaksanaan	Operasional	Penanganan kasus zoonosis lambat dan tidak terintegrasi	ROO.25.27.31.19	Kabid	Internal	C	Belum ada SOP koordinasi lintas sektor	Risiko penyebaran penyakit ke manusia	Masyarakat
20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pelaksanaan	Operasional	Pelanggaran izin usaha oleh pelaku usaha	ROO.25.27.31.20	Kabid	Internal/Eksternal	C	Pengawasan pasca izin terbatas	Dampak lingkungan dan sosial	Pelaku Usaha

21	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Peredaran obat hewan ilegal di tingkat pengecer	ROO.25.27.31.21	Kabid	Internal	C	Database pengecer tidak diperbarui	Risiko resistensi antimikroba meningkat	Peternak
22	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelaksanaan	Operasional	Kelembagaan petani tidak berkelanjutan	ROO.25.27.31.22	Kabid	Internal/Eksternal	C	Pendampingan tidak berkelanjutan	Kelembagaan kelompok ternak lemah	Peternak
23	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang Tersedia dan Termanfaatkan	Pelaksanaan	Operasional	Sarana prasarana penyuluhan tidak dimanfaatkan	ROO.25.27.31.23	Kabid	Internal	C	Pengadaan tidak sesuai kebutuhan penyuluh	Kegiatan penyuluhan tidak optimal	Penyuluh
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pelaksanaan	Operasional	Transfer pengetahuan kepada peternak tidak efektif	ROO.25.27.31.24	Kabid	Internal	C	Kurikulum tidak aplikatif dan partisipasi rendah	Kapasitas peternak tidak meningkat	Peternak

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hambatan yang dialami selama pelaksanaan pengelolaan risiko Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2026 Tribulan 1 antara lain:

- a. Pelaksanaan yang tumpang tindih dengan kegiatan lainnya
- b. Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan risiko
- c. Volume pekerjaan yang cukup banyak sehingga pelaksanaan pengelolaan risiko kurang maksimal.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD								
1	Tidak tercapainya target peningkatan populasi ternak	RSO.25.27.31.01	Program vaksinasi ternak	Cakupan vaksinasi belum merata dan sistem pemantauan vaksinasi belum terintegrasi	Penguatan sistem kewaspadaan dini penyakit hewan melalui peningkatan surveilans dan monitoring vaksinasi	Kepala Dinas	Semester I Tahun 2026	
			Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Distribusi bibit unggul terbatas dan layanan IB belum menjangkau seluruh wilayah sentra peternakan	Optimalisasi layanan IB dengan penyediaan bibit unggul terstandar dan perluasan jangkauan pelayanan		Semester I Tahun 2026	

			Penyuluhan pakan dan manajemen ternak	Belum tersedia sistem cadangan pakan dan pengelolaan pakan kolektif di tingkat kelompok ternak	Pengembangan bank pakan berbasis bahan baku lokal dan penguatan manajemen pakan kelompok ternak		Semester I Tahun 2026	
2	Tidak tercapainya peningkatan nilai tambah produk peternakan	RSO.25.27.31.02	Pendampingan kelompok usaha peternakan	Akses terhadap teknologi dan peralatan pengolahan hasil peternakan masih terbatas	Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan peralatan pengolahan hasil peternakan	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2026	
			Fasilitasi promosi produk olahan peternakan	Sebagian pelaku usaha belum mampu menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar mutu dan daya saing	Pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas pengolahan produk peternakan		Semester II Tahun 2026	
			Pendampingan sertifikasi produk olahan peternakan	Sebagian produk belum memiliki sertifikasi halal, PIRT, atau higiene sanitasi	Pendampingan sertifikasi halal, PIRT, dan higiene sanitasi serta penguatan akses		Semester II Tahun 2026	

					pemasaran produk olahan			
Risiko Operasional OPD								
1	Ketidaktepatan pemanfaatan sarana oleh peternak	ROO.25.27.31.01	Verifikasi administrasi calon penerima bantuan serta pendampingan petugas teknis	Validasi lapangan belum dilakukan pada seluruh calon penerima	Pemutakhiran data calon penerima dan verifikasi lapangan sebelum penetapan penerima bantuan	Kabid PPHP	TW II	
2	Kegagalan standarisasi mutu genetik ternak	ROO.25.27.31.02	Pedoman seleksi bibit dan rekomendasi teknis petugas	Pengawasan mutu bibit belum konsisten	Pengetatan seleksi bibit dan pengujian mutu bibit secara berkala	Kabid Budidaya	TW II	
3	Hasil pengujian obat hewan tidak valid atau tidak akurat	ROO.25.27.31.03	SOP pengujian laboratorium dan pencatatan hasil	Kalibrasi alat belum dilakukan berkala	Penjadwalan kalibrasi dan uji banding laboratorium	Kabid Keswan	TW I	Maret 2026
4	Tidak terpenuhinya standar mutu produksi benih, bibit ternak dan pakan	ROO.25.27.31.04	Monitoring produksi dan laporan petugas lapangan	Perencanaan pengawasan belum berbasis data produksi	Perencanaan pengawasan berbasis data populasi ternak	Kabid Budidaya	TW II	

5	Ternak bantuan hilang, dijual atau tidak dipelihara penerima	ROO.25.27.31.05	Perjanjian penerima bantuan dan monitoring terbatas	Monitoring pemanfaatan bantuan belum rutin	Penguatan monitoring bantuan ternak dan sistem pelaporan pemanfaatan bantuan	Kabid Budidaya	TW I	Maret 2026
6	Keterlambatan atau mutu hijauan pakan tidak sesuai standar	ROO.25.27.31.06	Kontrak pengadaan dan pemeriksaan distribusi	Pengendalian mutu distribusi belum optimal	Penyusunan standar distribusi hijauan dan pengawasan mutu	Kabid Budidaya	TW II	
7	Kerusakan dini atau kegagalan struktur jalan usaha tani	ROO.25.27.31.07	Pengawasan lapangan dan serah terima pekerjaan	Pengawasan mutu konstruksi belum optimal	Penguatan pengawasan teknis konstruksi	Kabid Budidaya	TW III	
8	Prasarana tidak berfungsi optimal atau tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.27.31.08	Pengawasan lapangan dan serah terima pekerjaan	Pengawasan teknis belum optimal	Penguatan pengawasan kesesuaian spesifikasi	Kabid Budidaya	TW I	Maret 2026
9	Fasilitas layanan kesehatan hewan tidak berfungsi optimal	ROO.25.27.31.09	Pengawasan pekerjaan fisik dan serah terima	Pengendalian mutu belum optimal	Peningkatan pengendalian mutu konstruksi	Kabid Keswan	TW II	
10	Operasional RPH tidak memenuhi standar higiene sanitasi	ROO.25.27.31.10	Inspeksi RPH dan pembinaan higiene sanitasi	Pengawasan higiene sanitasi belum rutin	Penguatan inspeksi dan monitoring higiene sanitasi RPH	Kabid Kesmavet	TW I	Maret 2026

11	Kegagalan mitigasi penyebaran penyakit zoonosis	ROO.25.27.31.11	Tim teknis penanganan wabah	Koordinasi belum formal	Mekanisme koordinasi lintas sektor penanganan wabah	Kabid Keswan	TW I	Maret 2026
12	Lolosnya hewan atau produk hewan ilegal melalui perbatasan	ROO.25.27.31.12	Pemeriksaan dokumen dan ternak	SDM terbatas	Penguatan koordinasi pengawasan lintas instansi	Kabid Keswan	TW II	
13	Layanan laboratorium tidak memenuhi standar mutu	ROO.25.27.31.13	SOP pengujian laboratorium	Peningkatan kompetensi belum rutin	Pelatihan dan sertifikasi SDM laboratorium	Kabid Keswan	TW II	
14	Komplikasi atau kematian ternak pasca tindakan medis	ROO.25.27.31.14	SOP tindakan medis dan tenaga medik veteriner	Monitoring pasca tindakan belum sistematis	Penyusunan sistem pemantauan pasca tindakan medis dan rekam medis ternak	Kabid Keswan	TW I	Maret 2026
15	Hasil pengujian tidak akurat sehingga produk hewan tidak aman beredar	ROO.25.27.31.15	Pengujian sampel produk hewan	Kalibrasi alat belum rutin	Program kalibrasi dan pengendalian mutu laboratorium	Kabid Kesmavet	TW II	
16	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap standar higiene	ROO.25.27.31.16	Sosialisasi kepada pelaku usaha	Pembinaan belum merata	Monitoring kepatuhan higiene sanitasi berkala	Kabid Kesmavet	TW I	Maret 2026
17	Masyarakat tidak menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	ROO.25.27.31.17	Sosialisasi kesmavet	Materi belum aplikatif	Penyusunan materi edukasi berbasis praktik	Kabid Kesmavet	TW II	

18	Penolakan prinsip kesejahteraan hewan oleh pelaku usaha	ROO.25.27.31.18	Pembinaan dan kunjungan lapangan	Resistensi pelaku usaha	Pendekatan persuasif dan praktik baik kesejahteraan hewan	Kabid Kesmavet	TW III	
19	Penanganan kasus zoonosis lambat dan tidak terintegrasi	ROO.25.27.31.19	Tim teknis penanggulangan wabah	Koordinasi belum terpadu	Penguatan sistem komando terpadu penanganan wabah	Kabid Keswan	TW I	Maret 2026
20	Pelanggaran izin usaha oleh pelaku usaha	ROO.25.27.31.20	Monitoring izin usaha	Pengawasan belum rutin	Jadwal pengawasan berkala usaha	Kabid PPHP	TW II	
21	Peredaran obat hewan ilegal di tingkat pengecer	ROO.25.27.31.21	Pemeriksaan izin kios obat	Data kios belum mutakhir	Pemutakhiran database dan inspeksi rutin	Kabid Keswan	TW I	Maret 2026

V. PENUTUP

Pengelolaan risiko adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Setiap OPD harus siap untuk menyesuaikan strategi seiring dengan perubahan dalam lingkungan kinerja dan risiko yang mungkin muncul.

Pelaksanaan pengelolaan risiko di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu perbaikan dan penguatan di berbagai hal. Sehingga diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menekan adanya kemungkinan risiko yang muncul dan bisa mengelolanya dengan baik.